

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. (2002). *Mengubah Tabir Hukum* (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Anshori, Abduk Ghofur. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: INDAH.
- Ascharya, Ida Bagus. (2016). *Guide to Invest in Property*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Budiono, Herlien. (2008). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Cet. Kedua*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria. (1985). *Tata Laksana Pengurusan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Yayasan Hudaya Bina Sejahtera.
- H.M, Arba. (2017). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.S, Salim. (2010). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontral*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M.Yahya. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Hardiman, F.Budi. (2003). *Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Prolema Modernitas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Haris, Herdiansyah. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.

- Harsono, Boedi. (2008). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Harsono. (2012). *Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Liberty.
- Kansil, C.S.T. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata.
- Perangin, Effendi. (1994). *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, R.Wirjono. (1979). *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Rato, Dominikus. (2010). *Filsafat Hukum Mencuri: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Santoso, Urip. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sudasono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suparni, Niniek. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syahmin. (2006). *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Udiana, I Made. (2016). *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*. Bali: Udayana University Press.
- Widjaja, Gunawan, Muljadi, Kartini. (2003). *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah.

Sumber Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

Dewi, Avina Risma. *"Kekuatan Hukum dari Sebuah Akta di Bawah Tangan"*, *Jurnal Fakultas Hukum*, Bali: Universitas Udayana, 2015.

Latumeten, Pieter. *"Reposisi Pemberian Kuasa dalam Konsep "Volmacht dan Lastgeving" Berdasarkan Cita Hukum Pancasila, Jurnal Hukum & Pembangunan 47 No.1*, Depok: Universitas Indonesia, 2017.

Rahmani, Safira Riza, & Octarin, Nynda Fatmawati. *"Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah/Rumah Susun Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Penjual dan Pembeli"* *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Surabaya: Universitas Narotama, 2020.

Suci, Harum Melati. *"Jual Beli Tanah dengan Kuasa Jual yang Telah Berakhir Demi Hukum dan Akibat Hukumnya terhadap Akta Jual Beli (Studi Kasus Putusan Nomor 29PK/PDT/2009)"*, Tesis Magister Kenotariatan, Depok: Universitas Indonesia, 2013.

Sumber Internet

Aries, Albert. *"Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai Alat Bukti"*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53d8fec20b060/perjanjian-pengikatan-jual-beli-sebagai-alat-bukti/>, tanggal 22 Januari 2020.

Budi Irwanto, *PPh Final Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan*, <https://www.thinktax.id/tax-flash/pph-final-atas-pengalihan-hak-atas-tanah->

dan-atau-bangunan, pada tanggal 15 April 2021.

DDHTC News, *Pajak atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan*,

[https://news.ddtc.co.id/pajak-atas-pengalihan-hak-atas-tanah-dan-atau-](https://news.ddtc.co.id/pajak-atas-pengalihan-hak-atas-tanah-dan-atau-bangunan-10211?page_y=492)

[bangunan-10211?page_y=492](https://news.ddtc.co.id/pajak-atas-pengalihan-hak-atas-tanah-dan-atau-bangunan-10211?page_y=492), pada tanggal 15 April 2021.

Purnamasari, Irma Devita. “*Pengikatan Jual Beli dan Kuasa untuk Menjual*”,

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548f3f2f8a900/pengikat](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548f3f2f8a900/pengikatan-jual-beli-dan-kuasa-untuk-menjual/)

[an-jual-beli-dan-kuasa-untuk-menjual/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548f3f2f8a900/pengikatan-jual-beli-dan-kuasa-untuk-menjual/), diakses pada 24 Januari 2021

Samudra, Tun. “*Manfaat “Mensertifikatkan” Hak Atas Tanah dari Perspektif*

Hukum

dan

Ekonomi”

[https://www.kompasiana.com/tun/5a2f5946f133445e8b5e5b52/manfaat-](https://www.kompasiana.com/tun/5a2f5946f133445e8b5e5b52/manfaat-mensertifikatkan-hak-atas-tanah-dari-perspektif-hukum-dan-ekonomi?page=all)

[mensertifikatkan-hak-atas-tanah-dari-perspektif-hukum-dan-](https://www.kompasiana.com/tun/5a2f5946f133445e8b5e5b52/manfaat-mensertifikatkan-hak-atas-tanah-dari-perspektif-hukum-dan-ekonomi?page=all)

[ekonomi?page=all](https://www.kompasiana.com/tun/5a2f5946f133445e8b5e5b52/manfaat-mensertifikatkan-hak-atas-tanah-dari-perspektif-hukum-dan-ekonomi?page=all), diakses pada 29 Januari 2021.